

Anggap Gertakan Hasto Hanya Bargaining Politik, Rampai Nusantara: Besar Mulut Saja

Category: Hukum

written by Redaksi | 30/12/2024



ORINEWS.id – Sekretaris Jenderal (Sekjen) [PDIP](#) Hasto Kristiyanto untuk membongkar skandal korupsi pejabat yang mendiskreditkan [Joko Widodo \(Jokowi\)](#) usai dirinya ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ([KPK](#)) hanya gertakan sesaat.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar menyarankan jika Hasto memiliki bukti terkait kasus korupsi pejabat atau skandal lainnya mestinya segera melaporkan ke aparat penegak hukum bukan membangun opini liar di media seperti yang dilakukan saat ini.

“Hasto sekjen PDIP yang sudah menjadi tersangka jika memiliki bukti adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pejabat negara harusnya tak perlu koar-koar tapi silakan langsung

disampaikan saja bahkan laporkan segera ke penegak hukum, kalau hanya membangun opini, besar mulut saja terkesan hanya untuk gertak sambal atau membangun bargaining agar tidak di lanjut proses hukumnya,” tegas Semar kepada wartawan, Senin, 30 Desember 2024.

Menurut Semar Hasto sebaiknya juga menunjukkan komitmennya dalam penegakan hukum dengan taat pada proses hukum yang saat ini menjeratnya.

“PDI Perjuangan dan Hasto harus konsisten dengan komitmen untuk menjalani proses hukum jadi jangan juga cari celah untuk menghindari dari proses hukum saat ini,” tambahnya.

Semar menampik anggapan bahwa ada politisasi terhadap kasus hukum yang dilakukan terhadap Hasto ataupun kader PDIP lainnya hanya untuk meredam lawan-lawan politiknya oleh pihak tertentu.

“Kasus hukum yang berproses terhadap kader PDI Perjuangan tentu ini murni tindak pidana secara hukum tanpa ada politisasi atau kriminalisasi, mungkin saja selama ini ada yang melindungi sehingga sulit untuk dijerat dan saat ini mungkin tidak ada lagi yang bisa menghalangi karena PDI Perjuangan tidak memiliki kekuasaan lagi untuk melindungi para kadernya,” ujar Semar yang juga aktivis 98 tersebut.

Ia juga mempertanyakan pernyataan Hasto yang kembali menyinggung permintaan Jokowi untuk menjabat tiga periode padahal sudah berkali-kali dibantah yang bersangkutan.

“Jokowi sudah berkali-kali sampaikan dengan tegas dan jelas kalau tidak pernah minta tiga periode jabatan presiden dan PDI Perjuangan menggoreng isu ini dengan coba membangun opini sesat atau framing jahat karena ini sama sekali tidak benar dan sudah ditepis juga oleh Mbak Puan Maharani,” pungkasnya.[]